

ISSN 1412 - 9418

Vol VI Th 4 April-September 2005



HUMANIKA

Majalah Ilmiah Masalah Kehumanioraan

Berdasarkan SK Rektor No. 095/SK/J07/2002

Revitalisasi Fungsi Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bangsa Di Era Global Oleh : Ana Irhandayaningsih.....	1
Sekitar Upaya Mencapai Supremasi Hukum dan Masyarakat Madani Oleh : Ellen Christiani Nugroho.....	9
Keadaban Bangsa Di Era Global, Sebuah Persoalan Oleh : Joko Wasisto.....	17
Meningkatkan Produktivitas Kerja Melalui Pelatihan Outbound Oleh : Niken Fatimah Nurhayati.....	28
Memaknai Arti Pendidikan Menurut Driyakarya Oleh : Sri Sudarsih.....	34
Pengaruh Latihan Meloncat Ke Samping Terhadap Daya Ledak Otot Tungkai Oleh : Yusvo Supadmo.....	38
Potret Prestasi Indonesia Diajang Sea Games Tahunan 2005 Oleh : Jarot Marwoto.....	42
Pancasila Sebagai Paradigma Cipta Seni Oleh : Subandi.....	45
Penanggulangan Pemukiman Liar Dalam Perspektif Teologi Tata Kota (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang) Oleh : Suparno.....	51
Hubungan Antara Perilaku Seksual Anak Jalanan Dengan Resiko Infeksi Menular Seksual (IMS) Pada Anak Jalanan di Kota Semarang Oleh : Mariam Musawa.....	57
✓ Revitalisasi Pancasila Oleh : Iriyanto Widisuseno.....	67
Etika dan Moral Dalam Perspektif Perwujudan Reformasi Oleh : Edi Santosa.....	71
Peranan Kepemimpinan Dalam Membangun Motivasi dan Kepercayaan di Tempat Kerja Oleh : Agus Hermani DS.....	78

UNIT PELAKSANA TEKNIS MATA KULIAH UMUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Majalah UPT MKU UNDIP

Untuk membahas masalah-masalah humaniora
Terbit enam bulan sekali

Penerbit :
UPT MKU UNDIP

Pemimpin Umum
Kepala UPT MKU UNDIP
Joko Wasisto, S.Kar

Ketua Pelaksana
Sekretaris UPT MKU UNDIP
Dra. Niken Fatimah N. M.Pd.

Dewan Pakar
Prof. Dr. A. Gunawan Setiardja
Prof. Drs. Hartojo
Prof. Sudharto P.Hadi, MES, PhD.

Dewan Redaksi
Drs. Iriyanto Widisuseno, M.Hum
Ellen Christiani Nugroho, M.Hum.

Tata Letak/Artistik
Awang Kurnia Saputra, A. Mc

Tata Usaha
Tardjono, S.Sos.
Sri Suhartati, Bc.Hk.
Munzaeni
Sutomo
Iswanto

Alamat Redaksi / Tata Usaha
Jl. Hayam Wuruk No.5-7 Lt 1 Telp. (024) 8311515

Redaksi menerima sumbangan artikel yang berkaitan dengan masalah humaniora, dan terhadap artikel yang diterima, dewan redaksi berhak merubah redaksional tanpa mengurangi isi substansi artikel tersebut.

ISSN 1412 - 9418

DAFTAR ISI

Judul Artikel	Halaman
Revitalisasi Fungsi Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bangsa Di Era Global Oleh : Ana Irhandayaningsih	1
Sekitar Upaya Mencapai Supremasi Hukum dan Masyarakat Madani Oleh : Ellen Christiani Nugroho	9
Keadaban Bangsa Di Era Global, Sebuah Persoalan Oleh : Joko Wasisto	17
Meningkatkan Produktivitas Kerja Melalui Pelatihan Outbound Oleh : Niken Fatimah Nurhayati	28
Memaknai Arti Pendidikan Menurut Driyakarya Oleh : Sri Sudarsih	34
Pengaruh Latihan Meloncat Ke Samping Terhadap Daya Ledak Otot Tungkai Oleh : Yuswo Supadmo	38
Potret Prestasi Indonesia Diajang Sea Games Tahun 2005 Oleh : Jarot Marwoto	42
Pancasila Sebagai Paradigma Cipta Seni Oleh : Subandi	45
Penanggulangan Pemukiman Liar Dalam Perspektif Teologi Tata Kota (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang) Oleh : Suparno	51
Hubungan Antara Perilaku Seksual Anak Jalanan Dengan Resiko Infeksi Menular Seksual (IMS) Pada Anak Jalanan di Kota Semarang Oleh : Mariam Musawa	57
Revitalisasi Pancasila Oleh : Iriyanto Widisuseno	67
Etika dan Moral Dalam Perspektif Perwujudan Reformasi Oleh : Edi Santosa.....	71
Peranan Kepemimpinan Dalam Membangun Motivasi dan Kepercayaan di Tempat Kerja Oleh : Agus Hermani DS.....	78

REVITALISASI PANCASILA

Oleh: Iriyanto Widisuseno*)

ABSTRACT

Since the beginning of its historicity, Pancasila plays important position and function in the existence of Indonesia nation-state, i.e. as its worldview, state philosophical foundation, and national ideology. By the passing of time, Pancasila was distorted in some interpretations which brings many consequences and implications up to marginal limits. Those distortions are caused by epistemological confusions in understanding Pancasila. To solve this problem we need an epistemological revitalization of Pancasila, which means that scientific studies on Pancasila must be developed by education institutions in Indonesia.

Keywords: distortion, epistemological confusion, revitalization.

A. PENDAHULUAN

Apabila kita menengok kembali sejarah, betapa tidak kita harus mengakui bahwa sejak bangsa Indonesia belum merdeka, Pancasila telah diterima sebagai pandangan hidup. Bahkan dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pandangan hidup itulah terlahir Pancasila dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 secara formal Pancasila dijadikan dasar negara RI. Fakta sejarah ini memberikan kesaksian tentang kedudukan dan fungsi Pancasila yang sangat vital dan strategis. Pancasila menjadi *causa efficiens* bagi terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara dalam perkembangan sejarahnya terutama pada dekade dasa warsa terakhir ini, Pancasila telah mengalami *distorsi* hingga nyaris sampai titik margin yang memprihatinkan. Kenyataan ini mulai menggejala saat sesudah Orde Baru runtuh orang seakan-akan segan atau alergi bicara Pancasila. Keseganan itu bisa dimengerti, karena Pancasila selama Orde Baru disalahgunakan untuk mendukung sistem politiknya, padahal jelas tidak mendukungnya. Penyelewengan yang dilakukan oleh sebagian pemimpin dan tokoh orde baru berhasil secara halus bernaung atau berlindung di balik jubah

Pancasila, menyebabkan nilai luhur Pancasila menjadi kusam.

Keadaan ini diperparah lagi oleh menggelombangnya arus reformasi yang nyaris kehilangan *core philosophy*, lepas dari asumsi dasar dan arahnya. Reformasi yang seharusnya dimaknai sebagai proses perubahan menuju perbaikan, dalam prakteknya hanya diartikan sebagai perubahan semata, yaitu upaya meninggalkan apa yang sudah ada kemudian mengganti dengan hal baru, termasuk nilai-nilai moral Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lebih ironis lagi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU. No. 20 Tahun 2003) telah meniadakan Pendidikan Pancasila dari kurikulum lembaga pendidikan di Indonesia, seperti misalnya Pendidikan Pancasila tidak tercantum sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi. Apabila perkembangan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila akibat penyebarluasannya menjadi dangkal dan terbatas akan menimbulkan berbagai pembangunan yang kita laksanakan menjadi lepas kontak dengan spirit falsafahnya. Bila hal ini terjadi maka lambat laun akan

menimbulkan kekeroposan di sana sini (FKDP, 2005).

Kini mulai muncul gejala yang tak pernah ada habisnya, seperti misalnya di daerah-daerah muncul tuntutan mulai dari harsat pemekaran daerah hingga pelepasan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik-konflik horisontal terus berlangsung tak ada hentinya mengancam kehidupan bersama bangsa Indonesia. Teror dari sekelompok kecil orang dengan mengatasnamakan agama mayoritas terhadap hak asasi minoritas untuk beribadat menurut keyakinan religius mereka. Pancasila yang awal sejarahnya merupakan filsafat inti menjelma ke dalam pandangan hidup bangsa mampu mengatasi pluralitas bangsa, kini terkesampingkan menjadikan seolah telah rapuh dan kehilangan vitalitasnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika bangsa dan negara Indonesia tidak menghendaki kehancurannya, daya vitalitas Pancasila harus segera dikembalikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. PEMBAHASAN

1. Arti Revitalisasi

Revitalisasi hendaknya diartikan sebagai upaya mengembalikan peran penting Pancasila, atau menghidupkan kembali peran nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tingkat praksisnya, revitalisasi Pancasila di satu sisi akan berlangsung dalam proses waktu, membutuhkan komitmen nasional, dan di sisi lain akan menghadapi kondisi paradoks seperti dalam globalisasi. Derasnya globalisasi terutama yang berkembang melalui informasi, membawa manusia kehilangan jati dirinya. Melalui suatu media informasi terutama televisi dapat mempengaruhi dan bahkan membentuk manusia sedemikian rupa sehingga informasi dan opini yang dikembangkan melalui media televisi seakan-akan menjadi suatu kebenaran. Nilai-nilai etika, norma-norma agama kadangkala sulit membendungnya. Dalam kondisi seperti ini kehidupan manusia menjadi semakin

pragmatis, materialistis, dan praktis. Inilah sebabnya dalam upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila terutama nilai-nilai moralitas akan menghadapi tuntutan pragmatis, materialistis dan praktis. Misalnya, jika melaksanakan nilai-nilai Pancasila apakah akan memberikan manfaat secara praktis dalam kehidupan masyarakat? Kondisi paradoks seperti ini sangat berpengaruh bahkan merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan dalam upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2006:4).

2. Kekacauan Epistemologis

Menurut Kaelan (2006) dalam era reformasi dewasa ini muncul berbagai argumen politis berkaitan dengan pemahaman mengenai Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Ada yang berpangkal dari suatu ketidaktahuan, namun juga tidak jarang sebagai ungkapan sinis atau ejekan. Apapun alasan yang dikemukakan, yang jelas menunjukkan adanya kekacauan pengetahuan akan Pancasila dan kekerdilisan pemikiran anak bangsa tentang filosofi dan kepribadian sendiri.

Kekacauan epistemologis pertama, adalah menyamakan antara nilai, norma dan praksis (fakta) dalam memahami Pancasila. Pancasila adalah suatu sistem nilai yang merupakan suatu kesatuan utuh (Notonagoro, 1975: 52). Dalam hal demikian merupakan suatu sistem filsafat dan terdapat dalam realitas objektif bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah causa materialis Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus The Founding Fathers kita menetapkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, serta tercantum dalam tertib hukum Indonesia. Sebagai konsekuensinya Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam pengetahuan inilah maka menurut Notonagoro Pembukaan yang memuat Pancasila itu sebagai Staatsfundamentalnorm. Konsekuensinya nilai-nilai Pancasila secara yuridis harus diderivasikan ke dalam UUD negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh

peraturan perundangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis. Pancasila dalam kapasitas seperti ini, telah diderivasikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

Berdasarkan norma-norma peraturan perundang-undangan tersebut dapat diimplementasikan realisasi kehidupan kenegaraan yang bersifat praksis. Oleh karena itu tidak mungkin implementasi dilakukan secara langsung dari Pancasila kemudian direalisasikan dalam berbagai konteks kehidupan, karena harus melalui penjabaran dalam suatu norma yang jelas. Banyak kalangan memandang secara rancu, Pancasila secara langsung bersifat operasional dan praksis dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat.

Kekacauan epistemologis kedua, sering timbul dalam konteks politik yang menyamakan nilai-nilai Pancasila dengan suatu kekuasaan, rezim atau suatu orde. Kenyataan ini sering kita jumpai, bahwa berbicara Pancasila seakan-akan sebagai label Orde Baru, bahkan sebuah indoktrinasi. Fakta sejarah memang menunjukkan, bahwa ketika Orde Baru berkuasa Pancasila diturunkan derajatnya sebagai suatu legitimasi politis. Semua kebijakan pemerintah mengatasnamakan Pancasila, dengan istilah "suatu pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen". Pada zaman Orde Lama pun juga terjadi penyimpangan dengan mengembangkan Nasakom, Manipol Usdek, Tri Sila dan Eka Sila (Kaelan, 2006: 5). Kekacauan ini secara epistemologis harus diluruskan, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, sebagai pandangan hidup, dibedakan atau terlepas, dengan kekuasaan suatu rezim apapun.

Kekacauan epistemologis ketiga, memahami Pancasila dengan meletakkannya sebagai suatu varian yang setingkat dengan agama. Di kalangan politik yang mendasarkan pada pemikiran negara agama, memandang Pancasila sebagai penghalang bahkan mengancam agama. Dasar tuduhannya, Tuhan

menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang mampu melingkupi Kristen, Islam, Budha, dan Hindu, bahkan Animisme (Chaidar, 1998: 36).

Kekacauan epistemologis ini akan membawa konsekuensi yang serius terhadap proses revitalisasi nilai-nilai Pancasila.

3. Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila

Kekeliruan, kekacauan epistemologis sebagai akibat pemikiran emosional dan apriori saatnya harus segera diakhiri. Strategi yang utama untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah melalui revitalisasi epistemologis, yaitu Pancasila harus dikembangkan dengan melalui suatu kajian ilmiah di dunia pendidikan di Indonesia. Revitalisasi epistemologis dilakukan dengan mengembangkan core philosophy Pancasila, sebagai suatu filsafat bangsa Indonesia (Kaelan, 2006: 8). Melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila dengan proses epistemologis tersebut akan sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dan negara Indonesia. Sangat lucu jika kajian ilmiah mengenai Pancasila di perguruan tinggi kini semakin melemah, apalagi tidak memberikan kuliah Pancasila.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu dilakukan dalam dua arah: (1) Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, (2) Pancasila sebagai landasan etik pengetahuan. Kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan adalah yang paling strategis, karena pendidikan tidak hanya mencetak manusia-manusia yang cerdas, trampil namun juga mempertahankan, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai filosofi bangsa sebagai local genius sekaligus sebagai ciri khas bangsa. Menurut Kaelan (2006) revitalisasi nilai-nilai Pancasila bukan hanya pada tingkat das sollen saja, melainkan juga pada tingkatan das sein yaitu realisasi bidang kenegaraan, pemerintahan, kebijakan, politik, hukum serta etika politik dalam kehidupan kenegaraan. Dalam arti kata, revitalisasi nilai-

nilai Pancasila meliputi *sein imm sollen* dan *sollen im sein*.

C. KESIMPULAN

1. Krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia pada dasarnya bersumber dari adanya krisis ideologi yang mengembang ke arah krisis kepribadian bangsa dengan berbagai implikasinya.
2. Krisis tersebut terjadi karena :
 - a. Pendangkalan pemahaman (kekacauan epistemologis) mengenai Pancasila, yang membuka peluang terjadinya pembelokan pemaknaan tentang kedudukan dan fungsi baik sebagai dasar negara, ideologi maupun kepribadian bangsa.
 - b. Tidak ada komitmen secara nyata dari para pemimpin negara dan elit politik untuk melaksanakan Pancasila sebagai dasar filsafat, negara dan ideologi bangsa, sehingga dalam kapasitas formalnya Pancasila hanya sekedar nama.
 - c. Belum dihayati dan dilaksanakannya Pancasila sebagai ideologi dan kepribadian bangsa oleh seluruh anggota masyarakat Indonesia.
3. Sebagai solusinya, melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dengan melalui penataan kekacauan epistemologis dan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bukan hanya pada tingkat *das sollen* saja, melainkan sampai tingkatan *das sein*.

*) **Drs. Iriyanto Widisuseno, M.Hum.**
Dosen Pengajar UPT MKU Universitas
Diponegoro

DAFTAR PUSTAKA

- Chaidar-AI, 1998, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*, Darul Fallah, Jakarta.
- Forum Komunikasi Dosen Pancasila Jawa Tengah, 2005, Hasil Rekomendasi Semilokanas 2005, di UPS. Tegal.
- Kaelan, 2006, *Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia*, Makalah Seminar Mengenang Satu Abad Kelahiran Prof. Notonagoro
- Notonagoro, 1975, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta